

## DAFTAR REFERENSI

### BUKU :

- Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau. *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2024*. Diedit oleh BPS Provinsi Kepulauan Riau. Tanjungpinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2024. <https://kepri.bps.go.id/publication/2024/02/28/fd7185609074aa933a154621/provinsi-kepulauan-riau-dalam-angka-2024.html>.
- Effendy, Rusli. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin University Press, 1991.
- Ichsan, Reza Nurul, Sarman Sinaga, dan Lukman Nasution. *Ekonomi Koperasi dan UMKM*. Diedit oleh Ali Mukti Tanjung. Ed. 1. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021.
- Garner, Bryan A (ed.). "Black's Law Dictionary." ST.Paul, Minn, West Group, 1999.
- Manan, Bagir. "Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional." Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1994.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pe. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyati, Etty. "Kredit Perbankan, Bandung: PT." *Refika Aditama*, 2016.
- Pressman, Jeffrey L, dan Aaron B Wildavsky. "How great expectations in Washington are dashed in Oakland." *University of California: Berkeley, LA, USA*, 1973.
- Priadana, Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum cetakan ketujuh." *PT Citra Aditya Bakti, Bandung*, 2012.
- Rosjidi, Ranggawidjaja. "Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia." *Mandar Maju, Bandung*, 1998.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Daerah perspektif Konstitusionilisme Indonesia*. Diedit oleh Hendry Sihaloho. Edisi 1. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012.

Soedjono Dirdjo Sisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi 12. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Dilengkapi Contoh-Contoh Naskah Kebijakan Policy Paper*. Alfabeta, 2008.

Surachmin, Azas. *255 Azas dan Prinsip Hukum serta Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.

Syaukani, H R, Afan Gaffar, dan M Ryaas Rasyid. *Otonomi daerah : Dalam negara kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Tachjan, H. *Implementasi kebijakan publik*. Diedit oleh Deden Mariana. Penerbit AIPI Bandung. Cetakan 1. Bandung: Penerbit AIPI Bandung, 2006.

Terok, Gregoryo. "Fungsi Jaminan dalam Pemberian Kredit." *Lex Privatum* 1, no. 5 (2013): 5–15.

Wintgens, Luc J. *The theory and practice of legislation: essays in legisprudence*. Routledge, 2017.

#### **JURNAL / KARYA TULIS ILMIAH :**

Astri Putri Utami, Arsita Rahmahita, dan Derris Dermawan. "UMKM Sebagai Peningkatan Pembangunan Ekonomi Bangsa Indonesia ." *Jurnal Manajemen Akuntansi* 4 (Oktober 2022): 995–1001. <https://doi.org/10.36987/jumsi>.

Bunga, Marten. "Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (2017): 12–25.

Huzaeni, Mohamad Roky, dan Nuril Firdausiah. "Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 3, no. 1 (2022): 42–55.

Jumadi, Jumadi. "Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1, no. 1 (2018): 27–40.

Mobilu, Nur'ain. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Penjaminan Kredit Daerah di Provinsi Gorontalo." Universitas Negeri Gorontalo, 2018. <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271414084/urgensi-pembentukan-peraturan-daerah-tentang-lembaga-penjaminan-kredit-daerah-di-provinsi-gorontalo.html#>.

Maliangkay, Kezia Winda. "Tinjauan Hukum Lembaga Penjamin Kredit Umkm." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).

Pratama Putra, Gede Surya, dan Made Dwi Setyadhi Mustika. "Efektivitas Program Jamkrida dan Dampaknya terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 3, no. 12 (2012): 44493.

Putri, Ananda Rayhana. "Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Menjadi Salah Satu Parameter Good Governance." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 2 (2022): 23.

Siregar, Nur Fitriyani. "Efektivitas Hukum." *Al-Razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (1 Desember 2018): 1–16. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/view/23>.

Sunaryo, Deni. "Pengaruh Penjaminan Kredit Daerah Dan Bankable Terhadap Pertumbuhan Umkm Di Provinsi Banten (Yang Terdaftar Di Pt. Jamkrida Banten Priode 2015-2018)." *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis* 17, no. 3 (2019): 75–91.

#### **DOKUMEN :**

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2002)

Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Pub. L. No. 25 (2002).

———. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Pub. L. No. 1 (2016).

———. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pub. L. No. 12 (2011).

———. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 23 (2014).

Pemerintah Daerah Kepulauan Riau. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, Pub. L. No. 1 (2015).

Gubernur Kepulauan Riau. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, Pub. L. No. 34, 449 (2020). <https://ppid.kepriprov.go.id/laman/rkpd-provinsi-kepulauan-riau>.

- . Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Pub. L. No. 92 (2021). <https://ppid.kepriprov.go.id/daftar-informasi/lihat/842>.
- BPK RI. “Catatan Berita Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta Tahun 2023 Sebesar Rp83,7 Triliun Rupiah Fokus Untuk Tiga Program Prioritas.” [jakarta.bpk.go.id](https://jakarta.bpk.go.id), 2023. <https://jakarta.bpk.go.id/catatan-berita-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dki-jakarta-tahun-2023-sebesar-rp837-triliun-rupiah-fokus-untuk-tiga-program-prioritas/>.
- Detik Bali. “Pemprov-DPRD NTB Sepakati APBD-P 2023, Bidik Pendapatan Rp 6,12 Triliun.” [detik.com](https://www.detik.com), 2023. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6918826/pemprov-dprd-ntb-sepakati-apbd-p-2023-bidik-pendapatan-rp-6-12-triliun>.
- Nurhidayat, Despian. “Kepri Disiapkan untuk Jadi Hub Barat Ekspor UMKM.” *Media Indonesia*, 2022. <https://mediaindonesia.com/ekonomi/482234/kepri-disiapkan-untuk-jadi-hub-barat-ekspor-umkm>.
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. “Tentang Kepri : Profil Singkat Provinsi Kepulauan Riau.” [kepriprov.go.id](https://kepriprov.go.id). Diakses 27 Juli 2024. <https://kepriprov.go.id/laman/tentang-kepri>.
- Pemprov Kepri. “APBD Perubahan Kepri 2023 Disahkan Sebesar Rp4,459 Triliun.” [www.kepriprov.go.id](https://www.kepriprov.go.id), 19 September 2023. <https://www.kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/apbd-perubahan-kepri-2023-disahkan-sebesar-rp4-459-triliun>.
- Rahardyan, Aziz. “OJK Dorong Provinsi Punya Jamkrida, Percepat Penjaminan Kredit UMKM.” *Bisnis.com*, 2022. <https://finansial.bisnis.com/read/20220727/215/1559977/ojk-dorong-provinsi-punya-jamkrida-percepat-penjaminan-kredit-umkm>.